

Pertarungan Ideologi Kurikulum dan Kerentanan Pendidikan Indonesia

Ouda Teda Ena

Kalau kita sebagai guru atau dosen ditanya: “Apa ideologi pendidikan Anda?” mungkin kita akan terkejut atau tidak bisa menjawab atau kita akan menjawab sekenanya.

Tak jarang pendidikan kita anggap sebagai sesuatu yang netral dan apolitis. Pada kenyataannya pendidikan selalu sarat nilai, politis, dan bahkan sarat kepentingan. Namun demikian jarang sekali yang menyadarinya atau kebanyakan pelakupendidikan menghindarinya. Bahkan ketika ada yang menyampaikan hal ini tak jarang orang akan menolak dengan dalih bahwa pendidikan bertujuan mulia sehingga bebas dari berbagai kepentingan. Bahkan kesadaran akan saratnya kepentingan dalam dunia pendidikan ini tidak terjadi di FKIP di berbagai universitas. Ketika saya mengamati dokumen kurikulum mereka, saya tidak menemukan adanya mata kuliah ‘politik pendidikan’ atau setidaknya mata kuliah yang mungkin menyelipkan topik ini.

Tulisan ini akan memaparkan berbagai jenis ideology pendidikan beserta manifestasinya serta membahasa kerentanan yang ditimbulkannya. Kurikulum biasanya akan menjadi medan pertempuran berbagai pihak yang mempunyai ideology berbeda. Diskusi singkat ini semoga menyadarkan posisi kita sehingga kita tidak hanya menjadi penonton atau bahkan menjadi korban pertempuran ideology pendidikan.

Ideologi Pendidikan

Pendidikan adalah tindakan terorganisir yang paling ideologis. Namun sebelum berdiskusi lebih jauh, marilah kita samakan dahulu pemahaman tentang kata ‘ideologi’ itu sendiri.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ideologi adalah: kumpulan konsep bersistem yg dijadikan asas pendapat (kejadian) yg memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Menurut O’Neill (1990) ideologi pendidikan berakar pada ideologi politik. Dalam KBBI ideologi politik (pendidikan) dijelaskan sebagai sistem kepercayaan yg menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik (pendidikan) yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapainya.

Konon, Napoleon Bonaparte-lah yang dipercaya sebagai penemu kata 'ideologue' untuk mendeskripsikan orang-orang yang mengkritik penguasa atau pemerintah secara berlebihan (Eagleton, 1991; Williams, 1994 dalam Leonardo, 2003). Dalam perkembangan selanjutnya Karl Marx menjelaskan ideology sebagai kesadaran palsu. Menurutnya kesadaran akan membentuk kehidupan social dan ideology adalah sebuah distorsi dari sebuah realitas yang objektif (Leonardo, 2003).

Leonardo (2003) dalam bukunya yang mengulas ideology pendidikan menjelaskan bahwa ideology mempunyai tiga dimensi. Ideologi adalah sesuatu yang dibutuhkan yang bisa bersifat negative sebagaimana diungkapkan oleh Marx, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang positif ketika ideology tersebut bisa dipakai untuk meluruskan kesadaran palsu yang diciptakan penguasa. Para penganut Marx melihat pendidikan adalah proses pelanggaran struktur masyarakat yang tidak berkeadilan, sekolah hanyalah sebagai institusi yang mereproduksi ketimpangan social. Namun bagi para penganut 'pedagogy of hope' pendidikan masih menyisakan harapan, sekolah adalah tempat untuk meluruskan kesadaran yang palsu, ideology diperlukan untuk mengorganisir kerangka pikir bagi sebuah objektifitas (McLaren, 1998 dalam Leonardo, 2003).

Ketika kita menganalisa sebuah ideology kita harus berpijak pada asumsi bahwa pokok permasalahan ideologi adalah masalah hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang ditanamkan melalui Bahasa. Bahasa dalam hal ini adalah semua bentuk wacana Bahasa, bukan saja Bahasa verbal tetapi juga Bahasa visual dan Bahasa simbol. Dengan demikian untuk memahami ideology pendidikan kita perlu menelaah Bahasa yang dipakai pada ranah pendidikan. Pelaku pendidikan, guru dan murid perlu mempelajari dan membongkar lagi atau mengabaikan apa yang sudah dipelajari untuk bisa melihat dengan gamblang sebuah ideology pendidikan.

Bahasa adalah alat yang dipakai untuk menghadirkan (atau menyembunyikan) sebuah ideology. Tak jarang Bahasa resmi yang kita jumpai dalam ranah pendidikan hamper selalu tak-politis dan terlepas dari kesejarahan (Apple, 1979 dalam Weis, McCarthy, & Dimitriadis, 2006). Kita tentu sangat paham dengan kondisi ini. Pemerintah selalu menanamkan ide (dengan Bahasa resmi) bahwa pendidikan adalah sesuatu yang murni dan bebas dari kepentingan politik. Tetapi kita juga dengan gamblang bisa melihat ketika menteri pendidikan berasal dari partai tertentu sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan partai itu mendapat bantuan yang melimpah ruah.

Pertarungan Berbagai Ideologi Pendidikan

Ideologi adalah sebuah alat untuk melanggengkan kekuasaan yang selalu disamakan maka perebutan kekuasaan khususnya dalam ranah pendidikan juga menjadi sangat samar. Tidak ada yang pernah bisa membuktikan secara empiris hubungan antara kebijakan atau tindakan dengan ideology. Di bawah ini saya meminjam penggolongan ideology pendidikannya O'Neill (1990) karena dia bisa menghubungkan ideology pendidikan dengan tindakan atau kebijakan secara nyata.

Ideologi Pendidikan menurut O'Neill (1990)

Ideologi pendidikan digolongkan menjadi enam golongan yang sebenarnya berasal dari dua golongan besar. O'Neill (1990) membagi ideology menjadi dua golongan besar yaitu konservatif dan liberal. Golongan konservatif meliputi tiga sub-golongan yaitu fundamental, intelektual, dan konservatif. Sedangkan golongan liberal dibagi lagi menjadi liberal, leberasi, dan anarki. Ideologi pendidikan mempunyai pengaruh langsung yang besar pada seseorang terkait dengan tujuan pendidikan, tujuan sekolah, pandangan terhadap pembelajar, tata kelola, sifat kurikulum, model pembelajaran, evaluasi, dan pengelolaan kelas.

Berikut ini ringkasan saya atas ideology pendidikan menurut O'Neill:

In educational fundamentalism, knowledge is a tool for reconstructing society in pursuit of a predetermined pattern of moral excellence where man is a moral agent. The approach is tacit anti-intellectualism and is opposed to the critical examination of preferred patterns of belief and behavior. Education is considered as moral regeneration and the ideology focuses on the original purposes of the existing social traditions and institutions, placing emphasis on a return to the past as a corrective reorientation.

In educational intellectualism, knowledge is viewed as an end to itself and truth has an intrinsic value, where man is man. That is, man's universal nature transcends specific circumstances. The approach is traditional intellectualism (stressing reason and speculative wisdom). Education is an orientation to life in general. It focuses on the intellectual history of a man, generally identified with the dominant Western intellectual tradition of classicism.

In educational conservatism, knowledge is for social utility and a means of realizing existing social values. Man is a citizen, who finds his highest fulfillment as an effective member of the

established social order. This approach is based on reasoned conformity and reliance on the best answers of the past as the most trustworthy guide to present action. Education is considered as socialization to the established system. The ideology focuses on existing social traditions and institutions and places emphasizes on the present situation, viewed in a relatively shallow historical perspective, that is, conventionalism.

In educational liberalism, knowledge is a necessary tool used in practical problem solving. The individual is a unique personality, who finds his greatest satisfaction in self-expression in response to changing conditions. The approach is effective thinking (practical intelligence), and the ability to solve personal problems effectively. Education is the development of personal effectiveness.

In educational liberationism, knowledge is a necessary tool for required social reforms. Man is a product of culture, who finds his highest fulfillment along the lines defined and controlled by the existing social system. The approach is based on the objective (rational- scientific) analysis and evaluation of existing social policies and practices. Education is the fullest realization of each person's unique potentialities as a distinctive human being. This ideology focuses on social conditions that block the fullest realization of individual potentialities, and emphasizes on the future (that is, on changes in the present system required to bring about a more humanistic and humanizing society). The purpose of individual is to bring about immediate large scale changes within the existing society. The ideology stresses the significant changes that affect the basic nature and conduct of the established social system

In educational anarchism, knowledge is a natural by-product of daily living. Individual personality is a value that transcends the requirements of any particular society. The approach is based on free choice and self-determination in a sane and humanistic social setting. Education is considered as a natural function of everyday living in a rational and productive social environment and the ideology focuses on the development of an "educational society" that either eliminates or radically minimizes the necessity for formal schools and other such institutional constraints on personal behavior, and emphasizes on a post-historical future in which people function as self-regulating moral beings. The purpose of the ideology is the continuous change and self-renewal within a constantly emerging society; stresses the need for minimizing and / or eliminating institutional restraints on a personal behavior (deinstitutionalization).

Kurikulum sebagai Medan Tempur

Dalam dunia pendidikan, ideology-ideologi di atas mewujud dalam kurikulum sekolah. Kurikulum setidaknya bisa kita pahami sebagai tiga hal. Pertama, kurikulum sebagai sebuah dokumen. Inilah pemahaman umum tentang kurikulum. Ketika kita menyebut kata kurikulum maka yang terlintas dalam pikiran adalah segepok dokumen yang memuat rambu-rambu dan segala hal yang terkait dengan pembelajaran. Kurikulum dalam arti yang pertama inilah yang paling mudah kita telaah sehingga ideologinyapun akan menjadi paling mudah dikenali. Misalnya kalau kita membaca dokumen kurikulum 2013 dan kemudian mencocokkannya dengan kriteria yang dibuat oleh O'Neill (1990) di atas, kita akan segera bisa menyimpulkan ideologinya.

Kurikulum dalam arti yang kedua adalah apa saja yang terjadi dalam praktek pendidikan (enacted curriculum). Apa yang terjadi di dalam praktek keseharian pendidikan lebih sulit ditelaah. Praktek keseharian tidak hanya melibatkan Bahasa verbal melainkan juga Bahasa visual. Seperti kita bahas diawal bahwa ideology mewujud melalui Bahasa, maka kurikulum sebagai praktek keseharian menggunakan Bahasa yang kompleks sehingga sulit untuk disimpulkan ideology apa yang sedang mewujud.

Ketiga, kurikulum juga bisa berarti sesuatu yang tersamar (hidden curriculum). Ideologi kurikulum tersembunyi adalah yang paling sulit dideteksi tapi menurut berbagai penelitian adalah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan ideology anak didik. Kurikulum tersembunyi biasanya hanya muncul dipermukaan dalam bentuk Bahasa symbol sehingga penerjemahan langsung bisa meleset atau bahkan salah.

Ketiga tingkat perwujudan kurikulum inilah yang menjadi arena perebutan berbagai pihak untuk menanamkan ideology tertentu pada anak didik.

Rezim Standar vs Rezim Deregulasi

Perebutan arena pendidikan yang sangat kentara terjadi di Indonesia saat ini adalah perbutan antara rezim standar melawan rezim deregulasi. Tetapi semenjak kurikulum 2006 dihentikan maka tampak jelas pemenangnya adalah rezim standar. Semua bidang kehidupan dalam pendidikan telah distandarisasi. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan standar adalah buruk dan tidak bermutu.

Pertentangan ini tidak hanya di Indonesia saja. Di Amerika Serikat yang berada pada kubu rezim standar adalah para ahli kebijakan pasar, kelompok bisnis, kelompok agama, pemikir konservatif, dan kelompok yang melihat pendidikan dalam masalah besar. Menurut kelompok ini pendidikan bersifat birokratis, tidak akuntabel, dan hasilnya kurang bagus. Maka reformasi berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja adalah solusi yang sangat tepat (Smith, 2003).

Para pemikir pendidikan biasanya berada pada kubu deregulasi. Standarisasi dipandang sebagai sesuatu yang perlu tetapi bukan merupakan solusi dan kadang malah menjerumuskan. Guru dan siswa hendaknya diberi ruang dan keleluasaan untuk berkembang sesuai jadi diri mereka sehingga akan tercipta masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan (Smith, 2003).

Standarisasi berasal dari rasionalitas teknis yang telah membawa perkembangan luar biasa di berbagai bidang. Kekeliruannya adalah bahwa rasionalitas ini lalu disamaratakan dan diterapkan di berbagai bidang yang tidak relevan seperti pendidikan, agama, dan seni. Orang lupa bahwa rasionalitas teknis yang bersifat hubungan positifistik sebab akibat hanya akan efektif apabila diterapkan pada fenomena non-manusia (Fay, 1975 dalam Tuinamuana, 2011).

Keunggulan dan Kerentanan Indonesia

Indonesia adalah bangsa yang terpelik secara demografi. Indonesia menempati urutan keempat dalam hal populasi dan mempunyai jumlah etnis dan Bahasa terbanyak di dunia. Hal ini adalah sebuah keunggulan namun pada saat yang sama adalah sebuah kerentanan. Jumlah penduduk dan perbedaan yang ada bisa menjadi modal utama untuk menjadi bangsa yang besar, namun tidak mustahil juga apabila perbedaan-perbedaan yang ada tidak dihidupi sebagai rahmat akan terjadi perpecahan dan kehancuran. Contohnya yang gagal menghidupi rahmat perbedaan adalah Uni Soviet dan juga beberapa Negara di Timur Tengah.

Berbagai unsur yang berbeda di Indonesia misalnya etnik dan agama belum bisa seperti yang dicita-citakan yaitu bhineka tunggal ika. Bhineka tunggal ika adalah keadaan ideal sebuah proeksistensi. Kondisi Indonesia saat ini baru pada tahap koeksistensi. Perbedaan yang ada baru ‘berada’ bersama, itupun belum mengendap, masih ada konflik-konflik yang muncul. Proeksistensi adalah ‘mengada’ bersama, keberadaan yang satu memperkaya keberadaan yang lain. Mengada bersama bisa jadi hanya sebuah utopia karena tidak pernah tercapai. Barangkali di sinilah peran pendidikan, menjaga dan memelihara asa supaya ‘mengada bersama’ ini tidak padam.

Kalau pendidikan kita gagal barangkali kita akan menuju sebuah dystopia. Koeksistensi atau ‘berada bersama’ yang saat ini terjadi justru akan menuju pada segregasi.

Tradisi ‘mengada bersama’ ini di Indonesia bisa kita lihat misalnya pada tradisi kegiatan gotong royong, kenduri, dan kegiatan lain sejenis. Masyarakat dari agama dan suku yang berbeda mempunyai kesempatan untuk berinteraksi secara tulus demi tujuan bersama. Namun tradisi-tradisi ini mulai berkurang bahkan hilang.

Tradisi segregasi pun di Indonesia sudah lama ada dan nampaknya masih terpelihara dan bahkan sekarang menjadi lebih mengkhawatirkan. Tradisi yang terpelihara bisa kita lihat di makam-makam yang terpisah di kota-kota. Kita juga bisa melihat kegagalan Indonesia untuk menyatukan sistem pendidikan nasional sehingga ada sekolah di bawah departemen agama dan di bawah departemen pendidikan. Tak jarang kita melihat asrama dan bahkan rumah kos yang melakukan segregasi berdasar agama. Pelajaran agama di sekolah manapun masih bersifat segregatif, tidak ada studi komparasi yang memungkinkan sebuah proeksistensi. Demikian pula UU perkawinan tahun 1974 tidak memungkinkan adanya ‘mengada bersama’. Bahan ajar di sekolah pun diskriminatif dan tidak berkeadilan (Ena, 2012; 2013)

Apabila pendidikan Indonesia berhasil satu ideology yang mendorong masyarakat yang baru koeksis menuju masyarakat yang proeksis maka perbedaan adalah sebuah keunggulan. Sebaliknya apabila gagal, koeksistensi yang ada akan mengarah pada segregasi dan menuju pada disintegrasi.

Penutup

Sesudah memahami berbagai aliran ideology pendidikan serta berbagai bentuk manifestasinya, dan juga memahami berbagai kerentanan yang ditimbulkannya, semoga kita bisa memahami pendidikan Indonesia dengan lebih baik. Apakah kita sedang menuju ke Indonesia yang Utopis? Para gembala tidak khawatir karena anak singa dan anak lembu merumput bersama? Ataukah kita sedang menuju ke Indonesia yang distopis di mana pertumpahan darah, tangis, dan kertak gigi terdengar siang dan malam?

Saya kira bukan dua-duanya. Indonesia bukan sebuah utopia, bukan sebuah cita-cita luhur, apalagi sebuah imaginasi, namun Indonesia juga bukan sebuah dystopia. Indonesia adalah

sebuah realitas. Maka pendidikan kita harus mampu menghidupi dua tegangan ini dengan penyadaran akan adanya kerentanan secara terus menerus.

Referensi

- BPS Strategic Data: Statistics Indonesia (2010). Jakarta: BPS-Statistic Indonesia.
- Campbell, D.E. (2010). *Choosing democracy: a practical guide to multicultural education*. Boston: Allyn & Bacon.
- Cochran-Smith, M. and Mary Kim Fries. (2001). Sticks, Stones, and Ideology: The Discourse of Reform in Teacher Education. *Educational Researcher*, Vol. 30. No. 8, pp. 3–15
- Davies, S. G. (2010). *Gender diversity in Indonesia: sexuality, Islam, and queer selves*. Hoboken: Routledge.
- Ena, O.T. (2012) *Visual analysis of e-textbooks for senior high school in Indonesia*. An unpublished dissertation. Chicago: Loyola University of Chicago.
- Ena, O.T. (2013) *Content analysis: Visual analysis of e-textbooks for senior high school in Indonesia*. Charleston: Createspace.
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi penuh muslihat: Akar kekerasan dan diskriminasi (Domination full of conspiracy: The root of violence and discriminations)*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/ideologi>.
- Leonardo, Z. (2003). *Ideology, discourse, and school reform*. Westport: Praeger Publishers.
- O'Neill, W. F. (1990). *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophy*. Dubuque, Iowa: Kendall / Hunt Publishing Company (first published in 1981).
- Ramstedt, M & Fadjar Ibnu Thufail (Ed.). (2011). *Kegagalan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa pasca-orde baru*. Jakarta: Grasindo.
- Ramstedt, M. (2011). Menafsir kembali tata norma Bali pasca-orde baru: reformasi Negara dan kegagalan makna ke-Bali-an. Dalam Ramstedt, M & Fadjar Ibnu Thufail (Ed.). *Kegagalan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa pasca-orde baru*. Jakarta: Grasindo.
- Smith Kevin B. (2003). *The ideology of education : the commonwealth, the market, and America's schools*. Albany: NUP.
- Tuinamuana, K. (2011). Teacher Professional Standards, Accountability and Ideology: Alternative Discourses. *Australian Journal of Teacher Education*. Vol 36, 12, December 2011 72
- Warta, C. (2011). Perkembangan masalah agama di Papua: Sengketa antara agama dan pencegahan konflik. Dalam Ramstedt, M & Fadjar Ibnu Thufail (Ed.). *Kegagalan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa pasca-orde baru*. Jakarta: Grasindo.
- Weis, L., Cameron McCarthy, and Greg Dimitriadis. (2006). *Ideology, curriculum, and the new sociology of education : revisiting the work of Michael Apple*. New York: Routledge.
- Zamudio, M. M.. (2011). *Critical race theory matters : education and ideology*. New York: Routledge.

Disampaikan pada Diskusi Lingkar Studi USD, 28 Mei 2015